

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah perubahan yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, dan perubahan ini terjadi secara terus-menerus dengan mengikuti norma-norma tertentu. Ada dua jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum. Sementara itu, pembangunan non-fisik melibatkan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diberikan kesempatan dan sumber daya untuk mengembangkan potensi mereka seperti memberikan pendidikan, pelatihan, atau dukungan sosial kepada masyarakat. (Sarintan, 2019: 18).

Secara global pembangunan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*). SDGs memiliki tujuan yang universal untuk mencapai keseimbangan dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs menekankan pentingnya memelihara keseimbangan antara perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai keseimbangan ini, SDGs didasarkan pada lima pondasi utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Pondasi manusia menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti

pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pondasi planet menekankan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan ekosistem bumi. Pondasi kesejahteraan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Pondasi perdamaian mengedepankan penyelesaian konflik, keadilan, dan lembaga yang kuat. Terakhir, pondasi kemitraan mendorong kerjasama global antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama. (Ishartono & Raharjo, 2016).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial, dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2017:4). Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Hal ini melibatkan upaya dalam meningkatkan standar hidup melalui berbagai pelayanan sosial dan jaminan sosial yang tersedia. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan keberdayaan individu dan kelompok melalui pembentukan sistem dan lembaga ekonomi, sosial, dan politik yang efektif. Pembangunan kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kebebasan individu dengan memperluas aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan.

Berbagai upaya dilakukan masyarakat Indonesia baik secara individu, keluarga, komunitas hingga sektor pemerintah untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat.

Menurut Jim Ife (1995) dalam Suharto (2017: 59) pemberdayaan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan (Anwas, 2019: 59)

Menurut Muljono (2011), yang dikutip oleh Nawawi (2017:2), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendekatan keluarga. Hal ini karena keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan keluarga memiliki nilai penting, karena melalui program pemberdayaan, informasi dan pengetahuan yang menjadi faktor penentu utama bagi kemajuan suatu masyarakat dapat ditransfer ke generasi mendatang. Dengan kata lain, pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk mengamankan pengetahuan dan informasi yang penting agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya guna memajukan masyarakat.

Keluarga menjadi aspek penting dalam konteks pembangunan sosial (Resnawaty, R, dkk, 2020). Keluarga dapat diartikan sebagai sebuah kelompok

atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat. Hubungan dalam keluarga biasanya didasarkan pada ikatan darah, perkawinan, atau ikatan lainnya. Mereka tinggal dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan berbagi makanan dari satu periuk (Clara dan Wardani, 2020:32).

Keluarga memiliki peran sentral dalam upaya membangun kesejahteraan, karena tanggung jawab pengasuhan, perawatan, penjagaan, dan pendidikan berada di tangan keluarga. Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencapai tujuan menjadi keluarga yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik, sehat dan sejahtera, berkembang dan mandiri, mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender, serta memiliki kesadaran akan hukum dan lingkungan (Kuswardinah, 2019:5). Salah satu indikator dari kesejahteraan keluarga yaitu bisa dilihat dari fungsi keluarga. Fungsi pokok keluarga menurut Friedman dan Bowden (2010) dalam Salamung, dkk (2021:5) yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan. Oleh karena itu pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga, akan tetapi keluarga mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, keluarga tidak lagi menjadi institusi yang aman dalam menjalankan fungsi dan dalam memberikan perlindungan dan sosialisasi kepada anggota keluarganya (Fahrudin, 2012).

Realitas sosial saat ini masih banyak keluarga yang lalai dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pertama dalam segi ekonomi, menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,15 juta jiwa atau 9,54% dari jumlah penduduk Indonesia ([Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)). Kondisi ekonomi keluarga ini dapat menjadi pemicu tingkat dan kualitas pendidikan anak dalam keluarga. Kedua dalam segi kesehatan, menurut Kementerian Kesehatan RI dikemukakan bahwa angka persentase stunting mencapai 24,4% pada tahun 2021. Indonesia berada di atas ambang 20% negara dengan kasus stunting yaitu sekitar 9 juta balita dan anak mengalami stunting ([Kementerian Kesehatan Republik Indonesia \(kemkes.go.id\)](https://kemkes.go.id)). Kemudian menurut data Kementerian Kesehatan 2021 diperkirakan terdapat lebih dari 500 ribu orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) . Ketiga dalam segi pendidikan, berdasarkan data statistik Kemendikbud ([Statistik Data Pendidikan \(kemdikbud.go.id\)](https://statistik.data.pendidikan.kemdikbud.go.id)) Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak angkat putus sekolah yaitu 6.106 (SD), 92.599 (SMP), 39.808 (SMA). Mengacu pada data-data tersebut, terlihat bahwa masih banyak keluarga di Indonesia yang belum terpenuhi fungsi-fungsi keluarganya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai isu yang ada dimasyarakat khususnya sebagai pembuatan kebijakan. Pemerintah Jawa Barat menuangkan solusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ([Perubahan-RPJMD-2018-2023_V.-08.12.2021.pdf \(jabarprov.go.id\)](https://jabarprov.go.id)). Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat memiliki program unggulan dalam berbagai bidang yang akan diimplementasikan pada tahun 2018-2023. Pada bidang pendidikan yaitu program akses pendidikan untuk semua. Programnya dinamakan sekolah juara yang

bertujuan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu Pendidikan. Bentuk dari program tersebut yaitu kelas pintar, sekolah dan ruang kelas baru, dan sekolah gratis bagi yang membutuhkan. Kemudian dalam bidang kesehatan yaitu desentralisasi layanan kesehatan. Kebijakan ini ditekankan kepada kesehatan masyarakat dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Dalam bidang ekonomi berupa ekonomi digital, inkubator bisnis, *creative/start-up hub*, gudang tani dan ikan juara, serta kredit 0%. Adapun kebijakan pemerintah tentang pencegahan *stunting* oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk cegah *stunting*, peningkatan kapasitas kader posyandu untuk manajemen posyandu, penyediaan sarana prasarana posyandu untuk cegah *stunting*, pelatihan *parenting* kepada kader posyandu, bidan dan tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sangat diharapkan masyarakat, khususnya ditingkat desa/kelurahan, kebijakan-kebijakan pemerintah terintegrasi dalam program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Suyono, Haryanto, (2009) dalam Anwas (2019) mengatakan posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di desanya. Posdaya sebagai sebuah gagasan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

mengimplementasikan nilai-nilai kegotongroyongan di masyarakat. Posdaya adalah sebuah gerakan dengan ciri khas “*bottom up programme*”, kemandirian, dan pemanfaatan sumberdaya serta potensi lokal sebagai sumber segala solusi.

Menurut Suyono dan Haryanto (2009) dalam Anwas (2019) bahwa posdaya, bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu di berbagai bidang seperti Posyandu, BKB, PAUD, UPPKS, pelayanan BLT, pelayanan beras murah, atau pelayanan pembangunan lainnya. Posdaya dibangun sebagai forum untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan untuk seluruh anggota keluarga yang dipadukan dengan saling terkait minimalnya pada 5 bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan.

Posdaya terbukti efektif dalam meningkatkan keberdayaan keluarga dan posdaya juga sukses memberikan perubahan dalam bidang fisik maupun non fisik (Rahayu,dkk, 2022). Data dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia dalam Nawawi (2017) menunjukkan bahwa data institusi Posdaya yang berada di wilayah Koordinator Wilayah II Jawa Barat terdapat 991 institusi Posdaya yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sedangkan menurut Damandiri (2012) dalam Anwas (2019:166) menyebutkan bahwa data posdaya dari mulai dirintis 2006 hingga akhir tahun 2012 telah mencapai lebih dari 17.000 posdaya yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Salah satu Posdaya yang berhasil dan menjadi salah satu Posdaya rujukan nasional adalah Posdaya Plamboyan (Anugrah Damandiri Award, 2016). Posdaya Plamboyan terbentuk pada tahun 2009 di Kampung Sukamaju RW 11 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Anggota dari Posdaya Plamboyan yaitu masyarakat RT 01, 02, 03 RW 11 sebanyak 258 Kepala Keluarga (KK) data pada tahun 2019. Pembentukan Posdaya Plamboyan berdasarkan pada mayoritas pekerjaan masyarakat Kampung Sukamaju adalah petani yang pada awalnya bekerja untuk orang lain atau bertani menggunakan lahan orang lain. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan keluarga mereka semakin meningkat dan tidak bisa hanya mengandalkan upah dari bertani saja. Keinginan untuk berkembang terhalang oleh pengetahuan yang terbatas untuk mengelola potensi yang ada dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa merantau bisa menjadi salah satu solusi dengan harapan mendapatkan penghasilan lebih besar. Namun pada akhirnya hal tersebut tidak cukup berhasil menambah penghasilan dan merubah kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah Desa Kayuambon melihat ini sebagai suatu masalah dan berupaya memberikan aksesibilitas berupa kerjasama dengan LPPM UPI untuk mengadakan Kuliah Kerja Nyata berbasis posdaya. Mengetahui gagasan tersebut, masyarakat antusias kemudian bergotong royong bersama mahasiswa membangun posdaya dengan menaruh harapan agar kehidupan mereka lebih sejahtera.

Dampak positif Posdaya Plamboyan sangat dirasakan oleh anggotanya dan masyarakat setempat. Posdaya Plamboyan merupakan posdaya binaan LPPM UPI

dari tahun 2009 hingga sekarang. Prestasi dari Posdaya Plamboyan sangat membanggakan dengan menjadi posdaya terbaik di Jawa Barat dari tahun ke tahun, bahkan menjadi Posdaya rujukan nasional atau Posdaya terbaik tingkat nasional dalam acara penganugerahan posdaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Damandiri di Semarang pada tahun 2016.

Posdaya Plamboyan adalah forum yang menaungi program-program kemasyarakatan guna mendorong kesejahteraan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut data Posdaya Plamboyan tahun 2015 menunjukkan bahwa, jumlah keluarga pra sejahtera di RW 11 berjumlah 29 keluarga namun pada April 2018 menurun hingga tersisa 2 keluarga dan 2019 menjadi 0 keluarga sehingga persentase kondisi keluarga pada Agustus tahun 2019 yaitu keluarga pra sejahtera 0%, keluarga sejahtera 1 30,72%, keluarga sejahtera 2 38,15%, keluarga sejahtera 3 19,29%, dan keluarga sejahtera 3+ 11,84% dengan jumlah 258 KK data pada tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa Posdaya Plamboyan memiliki peran penting dalam kesejahteraan keluarga khususnya masyarakat Kampung Sukamaju Desa Kayuambon.

Keberhasilan Posdaya Plamboyan tak lepas dari upaya yang dilakukan oleh pengurus dan dukungan dari berbagai pihak. Pengurus Posdaya Plamboyan sebagai pelaksana pengembangan masyarakat memiliki berbagai peran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggotanya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2017: 210). Menurut Jim Ife (2016: 558) peran pengembang masyarakat terdiri dari peran fasilitatif, peran edukatif dan peran

representatif. Hal tersebut juga terlihat dalam penelitian Untoro (2015) terkait peran pengurus Posdaya Edelwys dalam menangani ketahanan pangan yaitu sebagai fasilitator, mediator dan motivator.

Pengurus Posdaya Plamboyan berhasil mengantarkan masyarakat Kampung Sukamaju mencapai masyarakat yang mandiri. Pengurus Posdaya Plamboyan berhasil memfasilitasi berbagai kegiatan untuk memberdayakan anggotanya. Pengurus Posdaya Plamboyan juga memberikan pelatihan-pelatihan, informasi dan advokasi kondisi masyarakat Kampung Sukamaju. Hal tersebut dibuktikan dalam segi ekonomi, perkebunan dikembangkan sedemikian rupa sehingga variatif seperti bonbit (kebon bibit), jerlem (jeruk lemon), dan bonsai (kebon sayuran). Selain itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan lahan kosong dirumahnya untuk menanam tanaman bergizi. Kini banyak petani yang memiliki lahan pertaniannya sendiri. Pengurus Posdaya Plamboyan telah memberikan banyak manfaat bagi anggotanya. Sehingga rasa kepedulian mereka terhadap posdaya sangat baik. Pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh posdaya pun, mereka turut berperan aktif sehingga masyarakat juga ikut menyumbangkan ide dan aspirasi untuk inovasi kegiatan posdaya kedepannya.

Pada bidang pendidikan juga mengalami peningkatan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Salah satu buktinya yaitu peserta didik di PAUD Plamboyan berjumlah 90 orang data pada tahun 2023. Hal ini selaras dengan hasil penelitian di GEN NTB, PT. Holcim Cilacap serta Kabupaten Kudus dan Pati menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keluarga berbasis posdaya

telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang positif. Program pemberdayaannya antara lain seperti peningkatan pendidikan, ekonomi warga dan keseimbangan lingkungan. Kemudian yang paling menonjol dalam kegiatannya ada tiga komponen, yaitu posyandu, pos paud, dan kelompok kegiatan ekonomi produktif. Kemudian secara bersamaan mempunyai peran yang positif meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Rizka, dkk. 2017; Triyono, 2014; Ariyanto, dkk. 2012).

Pada bidang ekonomi kreatif mulai terbentuk inovasi seperti jodog keripik, rumah sumpia (rusum), dan warung binaan (warbin). Selain itu ada program yang ditujukan untuk para lansia, salah satunya yaitu mural lansia. Mural lansia bertujuan agar lansia tetap produktif diusia tuanya dan dipercaya mencegah pikun dini. Adapun dalam bidang keagamaan selain pengajian rutin yang dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ada nasyid yang didendangkan oleh remaja atau pemuda disana. Ini menjadi media pembelajaran yang sangat baik bagi remaja agar terhindar dari pergaulan yang kurang baik dan aktivitas yang tidak berguna. Hal ini didukung oleh penelitian tentang peningkatan kesejahteraan oleh Posdaya Projotamansari dan Posdaya Bina Sejahtera bahwa tingkat kesejahteraan keluarga ditentukan dari berbagai macam kebutuhan yang dapat tercukupi. Manfaat yang paling dirasakan masyarakat dengan adanya posdaya ini adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan. *Output* program posdaya dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Selain itu, dampak positif posdaya bagi masyarakat setempat ialah meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kemandirian masyarakat. (Nina, dkk. 2014; Abdurrazak, 2010

Berdasarkan latar belakang tersebut terkait dengan fenomena pengurus Posdaya Plamboyan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan berbagai program yang dijalankan, peneliti dalam konteks pekerjaan sosial makro tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait Peran Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dalam Kesejahteraan Keluarga (Studi di Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?”. Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana Peran Fasilitatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana Peran Edukatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana Peran Representatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik Informan
2. Peran Fasilitatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
3. Peran Edukatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
4. Peran Representatif Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Plamboyan dalam Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberi manfaat dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, teori atau konsep mengenai ilmu pekerjaan sosial dalam aras makro dan pemberdayaan sosial secara khusus mengenai Peran Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang merupakan salah satu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah kesejahteraan keluarga berupa pola pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pengurus Posdaya Plamboyan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah, Posdaya Plamboyan, dan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan program terkait pemberdayaan masyarakat.
3. Menjadi rujukan bagi masyarakat dan posdaya lain dalam membentuk atau mengembangkan posdaya untuk meningkatkan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; sistematika penulisan.
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu; teori yang relevan dengan penelitian meliputi tinjauan tentang peran, tinjauan tentang pemberdayaan, tinjauan tentang kesejahteraan keluarga, tinjauan tentang posdaya, dan tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan komunitas.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan

keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : **USULAN PROGRAM**, memuat dasar pemikiran, nama program yang diusulkan, tujuan program, sasaran program, sistem pelaksana program, metode dan teknik pekerjaan sosial yang digunakan, langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program serta indikator keberhasilan.

BAB VI : **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat simpulan hasil penelitian dan program serta saran